



Contents lists available at [Journal IICET](#)
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Peraturan pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, dan tata kelola: kajian terhadap pemerintah kampung perbatasan

Syaikhul Falah^{*)}, Juliana Waromi, Septianus Sulistiawan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, Papua, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Sept 21th, 2024
Revised Oct 27th, 2024
Accepted Nov 22th, 2024

Keywords:

Skow sae
Skow mabo
Moso
Tata kelola
Akuntabilitas sosial

ABSTAK

Pentingnya memahami pengaruh peraturan pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, dan tata kelola terhadap efektivitas pemerintahan di kampung perbatasan merupakan kunci untuk memperbaiki kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di wilayah strategis yang sering terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap efektivitas pemerintahan di kampung perbatasan dengan menggunakan metode mixed-methods. Metode ini menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mengkaji bagaimana regulasi, sosial audit, dan struktur tata kelola mempengaruhi partisipasi masyarakat dan hasil evaluasi publik. Data kuantitatif dikumpulkan dari 38 responden yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan pemuda di tiga kampung perbatasan: Skow Sae, Skow Mabo, dan Moso. Data dianalisis menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan sosial audit tidak selalu berpengaruh langsung terhadap tata kelola dan evaluasi publik, tata kelola yang baik secara signifikan mempengaruhi efektivitas sosial audit dan partisipasi anggaran. Temuan ini menyoroti pentingnya integrasi antara peraturan, akuntabilitas sosial, dan tata kelola dalam memperbaiki kinerja pemerintahan di kampung perbatasan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi regulasi, peningkatan transparansi dalam sosial audit, dan perbaikan struktur tata kelola sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pengembangan kebijakan dan praktek pemerintahan di wilayah perbatasan serta membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi faktor-faktor tambahan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi peraturan dan tata kelola.



© 2024 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Syaikhul Falah,
Universitas Cenderawasih
Email: nyaikulfalah@feb.uncen.ac.id

Pendahuluan

Kampung perbatasan adalah wilayah yang terletak di ujung batas negara yang seringkali terisolasi dan jauh dari pusat pemerintahan (Warsilah & Wardiat, 2017). Secara geografis, kampung ini biasanya berada di daerah yang sulit dijangkau, seperti pegunungan, hutan lebat, atau pantai terpencil. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat di kampung perbatasan umumnya berada pada tingkat rendah, dengan sumber daya yang terbatas dan ketergantungan pada pertanian subsisten (Diwyanto & Priyanto, 2014). Tantangan utama yang dihadapi oleh

kampung perbatasan meliputi keterbatasan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang rusak dan kurangnya fasilitas air bersih (Hajar et al., 2022); (Limi & Yunus, 2016). Selain itu, pengaruh budaya dari negara tetangga juga sering kali masuk, menciptakan dinamika sosial yang kompleks dan potensi konflik identitas budaya.

Pemerintah kampung memiliki peran strategis dalam mengelola wilayah perbatasan yang krusial untuk menjaga kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat setempat (Beni, 2021); (Noveria, 2017). Sebagai ujung tombak pemerintahan, mereka bertanggung jawab untuk memastikan implementasi peraturan pemerintah di tingkat lokal, termasuk pengawasan terhadap aktivitas lintas batas dan penegakan hukum. Tugas-tugas ini mencakup pemeliharaan keamanan, pengelolaan sumber daya alam, serta fasilitasi layanan publik yang tersedia. Dalam menjalankan perannya, pemerintah kampung harus beradaptasi dengan tantangan geografis dan sosial-ekonomi, serta bekerja sama dengan pihak berwenang di tingkat yang lebih tinggi (Prayitno & Subagiyo, 2018). Penerapan peraturan pemerintah oleh pemerintah kampung langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti dalam hal akses terhadap layanan dasar, perlindungan hak-hak warga, dan penguatan identitas nasional di tengah pengaruh budaya asing. Melalui peran ini, pemerintah kampung tidak hanya menjadi penjaga batas negara, tetapi juga berperan penting dalam memperjuangkan peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan (Arifin, 2022).

Akuntabilitas sosial sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat kampung (Febriana & Ivanaa, 2024). Dengan mendorong partisipasi aktif warga, pemerintah kampung dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Hakeu & Alim, 2024). Tata kelola yang baik, yang ditandai oleh keterbukaan informasi, kejujuran, dan pertanggungjawaban, menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung (Goo & Sanda, 2022). Ketika warga merasa dilibatkan dan melihat bahwa pemerintah bertindak dengan integritas, mereka lebih cenderung mendukung kebijakan dan program yang dijalankan. Hal ini tidak hanya meningkatkan legitimasi pemerintah kampung, tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan warga, karena kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Tjilen, 2019); (Yan Hanry, 2016).

Tata kelola desa sangat penting bagi masyarakat pedesaan, dengan peraturan pemerintah seperti UU Nomor 6 tahun 2014 menekankan perlunya integrasi teknologi dalam layanan publik (Assiddiq et al., 2023). Tata kelola yang baik, partisipasi masyarakat, dan persepsi positif sangat penting untuk tata kelola desa yang efektif, seperti yang terlihat dalam studi yang menyoroti dampaknya terhadap kinerja pemerintah desa (Rahmawati et al., 2023). Tata kelola yang efektif membutuhkan keterlibatan masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh perlunya partisipasi publik dalam pembangunan dan administrasi desa (Handayani et al., 2023a). Selain itu, mekanisme seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sangat penting untuk keberhasilan implementasi dana desa dan pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan (Dewi, 2023b). Mekanisme akuntabilitas sosial, seperti pembentukan Peraturan Desa (Perdes) untuk mengelola aset desa, sangat penting untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam tata kelola pedesaan (Gufran et al., 2023).

Implementasi peraturan pemerintah di kampung perbatasan sering menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang kompleks. Korupsi menjadi salah satu masalah umum, di mana penyelewengan dana dan penyalahgunaan kekuasaan dapat menghambat penerapan kebijakan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fernanda et al., 2023); (Simanjuntak et al., 2023). Kurangnya sumber daya, baik finansial maupun manusia, memperburuk situasi, menyebabkan keterbatasan dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur (Ananda, 2018). Minimnya pengawasan dari otoritas yang lebih tinggi juga membuka peluang bagi pelanggaran aturan dan mengurangi efektivitas kebijakan (Zuhro, 2018). Tantangan lain adalah memastikan mekanisme akuntabilitas sosial berjalan dengan efektif di wilayah yang terisolasi dan sulit dijangkau, di mana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sering kali terbatas dan pengawasan eksternal sulit dilakukan (Suherry & Fajar Saputra Belly, 2024). Hal ini mempersulit upaya untuk menjamin bahwa peraturan pemerintah dijalankan secara transparan dan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini mengundang pertanyaan tentang bagaimana peraturan pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, dan tata kelola dapat dioptimalkan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan kampung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dan kesejahteraan rakyatnya, mengoptimalkan peraturan pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, dan tata kelola sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa tata kelola yang baik secara positif mempengaruhi persepsi publik, kinerja pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat (Assiddiq et al., 2023). Implementasi kebijakan yang efektif, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sangat penting untuk pembangunan desa (Rahmawati et al., 2023). Namun, tantangan seperti kurangnya transparansi, partisipasi masyarakat yang rendah, dan masalah akuntabilitas tetap ada,

menghambat kemajuan. Transformasi desa menjadi entitas otonom telah menimbulkan kekhawatiran tentang masa jabatan kepala desa yang berkepanjangan yang berdampak pada proses pembangunan dan demokratisasi (Handayani et al., 2023a). Memanfaatkan teknologi informasi untuk layanan publik dan menerapkan sistem peradilan pidana terintegrasi dapat memerangi korupsi dan meningkatkan pemberian layanan kepada masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan program pembangunan sangat penting untuk keberhasilan tata kelola dan pembangunan berkelanjutan (Gufran et al., 2023).

Kajian ini penting dilakukan karena kampung perbatasan memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan wilayah dan stabilitas nasional. Sebagai garis depan kedaulatan negara, kondisi tata kelola di kampung perbatasan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan lokal, tetapi juga memengaruhi keamanan nasional secara keseluruhan. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang dihadapi dalam penerapan peraturan pemerintah dan akuntabilitas sosial, kajian ini dapat mengungkap tantangan-tantangan yang menghambat optimalisasi fungsi pemerintahan di wilayah perbatasan. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berbasis data, yang mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan serta memperkuat mekanisme akuntabilitas sosial di kampung perbatasan. Dengan demikian, masyarakat di wilayah ini akan lebih terlindungi, terlayani, dan mampu berkontribusi secara positif dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara.

Penelitian ini bertujuan untuk membuat model kausalitas antara peraturan pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, dan tata kelola dalam pemerintahan kampung. Tujuan khususnya adalah untuk: (1) Menganalisis peran peraturan pemerintah dalam menentukan tata kelola pemerintahan di tingkat kampung. (2) Meneliti efektivitas mekanisme akuntabilitas sosial seperti transparansi, partisipasi masyarakat, dan mekanisme pengaduan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan kampung. (3) Mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan kampung melalui optimalisasi peraturan pemerintah dan mekanisme akuntabilitas sosial.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-methods dengan integrasi sekuensial, yang memungkinkan kombinasi analisis kuantitatif dan kualitatif secara berurutan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang pengaruh peraturan pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, dan tata kelola terhadap efektivitas pemerintahan di kampung perbatasan (Waruwu, 2023); (Azhari et al., 2023). Fase pertama dari penelitian ini melibatkan pengumpulan data kuantitatif melalui survei yang dilaksanakan di tiga kampung perbatasan: Skow Sae, Skow Mabo, dan Moso. Sebanyak 38 responden, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan pemuda dilibatkan untuk menjawab kuesioner yang dirancang untuk mengukur pengaruh regulasi, sosial audit, dan tata kelola terhadap partisipasi anggaran dan evaluasi publik. Data kuantitatif ini kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk mengidentifikasi hubungan dan pola yang relevan.

Fase kedua melibatkan pendekatan kualitatif, di mana wawancara mendalam dan diskusi kelompok fokus dilakukan dengan responden yang sama untuk menggali perspektif dan pengalaman mereka terkait implementasi peraturan, akuntabilitas sosial, dan tata kelola. Data kualitatif ini dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana ketiga faktor tersebut berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas pemerintahan. Integrasi sekuensial dilakukan dengan menggabungkan hasil dari kedua fase ini untuk memberikan gambaran yang lebih holistik dan mendetail mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan pemerintahan di kampung perbatasan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkonfirmasi dan memperluas temuan awal serta menyarankan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

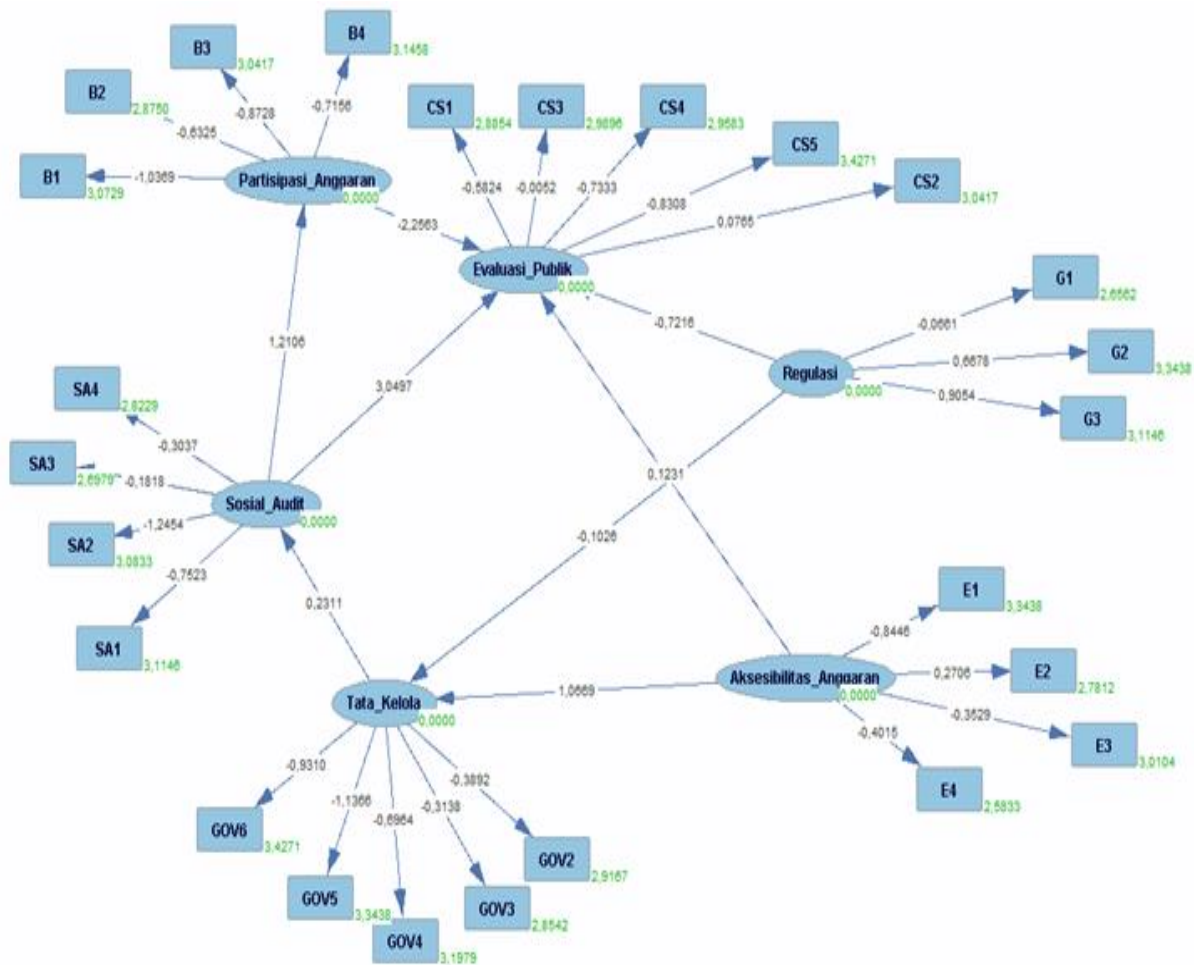
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa sampel yang diambil benar-benar mewakili populasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam studi ini, responden dipilih secara selektif berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap penting untuk memahami pengaruh peraturan pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, dan tata kelola terhadap efektivitas pemerintahan di kampung perbatasan. Kriteria pemilihan mencakup peran dan posisi responden dalam masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan pemuda yang memiliki wawasan mendalam mengenai implementasi regulasi dan tata kelola di kampung perbatasan.

Dalam penelitian ini, alat analisis data yang digunakan adalah TETRAD IV, sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu dalam analisis kausal dan pemodelan struktur kausalitas dari data. TETRAD IV memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan kausal antara variabel-variabel yang diteliti, dengan

fokus pada identifikasi struktur kausalitas yang paling konsisten dengan data yang tersedia. Perangkat ini digunakan untuk menganalisis hasil survei kuantitatif dan membantu menguji hipotesis tentang pengaruh peraturan pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, dan tata kelola terhadap efektivitas pemerintahan di kampung perbatasan. Melalui penggunaan TETRAD IV, penelitian ini mampu menyusun model kausalitas yang lebih kuat, yang kemudian diintegrasikan dengan temuan kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika tata kelola di wilayah perbatasan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil



Gambar 1. Model Struktural Penelitian

Gambar diatas menyajikan model struktural dalam penelitian ini yang menggambarkan hubungan kausal antara variabel-variabel utama, yaitu peraturan pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, tata kelola, dan efektivitas pemerintahan di kampung perbatasan. Model ini dirancang untuk memahami bagaimana peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah mempengaruhi tata kelola di tingkat lokal, serta bagaimana tata kelola tersebut berinteraksi dengan mekanisme akuntabilitas sosial, seperti sosial audit dan partisipasi masyarakat, untuk mempengaruhi hasil akhir berupa evaluasi publik dan efektivitas layanan pemerintah. Dalam model struktural ini, peraturan pemerintah dan tata kelola dianggap sebagai variabel independen, sementara akuntabilitas sosial berperan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan kedua variabel tersebut dengan efektivitas pemerintahan. Melalui analisis menggunakan TETRAD IV, model struktural ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi jalur kausalitas yang signifikan dan untuk memodelkan interaksi kompleks antara variabel-variabel tersebut, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika tata kelola di wilayah perbatasan.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik TETRAD IV

From	To	Type	Value	SE	T	P
Aksesibilitas_Anggaran	Tata_Kelola	Edge Coef.	1,0669	0,1057	10,0921	0,0000
Aksesibilitas_Anggaran	Evaluasi_Publik	Edge Coef.	0,1231	0,1089	1,1305	0,2611
Partisipasi_Anggaran	Evaluasi_Publik	Edge Coef.	-2,256	1,7244	-1,3084	0,1939
Regulasi	Evaluasi_Publik	Edge Coef.	-0,722	0,0727	-9,9219	0,0000
Regulasi	Tata_Kelola	Edge Coef.	-0,103	0,0835	-1,2293	0,2220
Sosial_Audit	Evaluasi_Publik	Edge Coef.	3,0497	2,0938	1,4565	0,1485
Sosial_Audit	Partisipasi_Anggaran	Edge Coef.	1,2106	0,0094	128,4262	0,0000
Tata_Kelola	Sosial_Audit	Edge Coef.	0,2311	0,1007	2,2955	0,0239

Sumber: Data TETRAD diolah, 2024

Tabel diatas menunjukkan informasi mengenai hasil pengolahan data kuisioner yang disebarkan kepada respnden yang diikutsertakan dalam penelitian ini. Setelah diolah, data yang diinput menghasilkan informasi sebagai berikut: (1) Aksesibilitas anggaran terhadap tata kelola mengindikasikan pengaruh yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t statistik yang lebih besar dari t tabel ($10,09 > 1,98$) dengan p value $0,000 < 0,05$. (2) Aksesibilitas anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap evaluasi publik. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t statistik $< t$ tabel ($1,13 < 1,98$) dan nilai signifikansi $0,26 > 0,05$. (3) Partisipasi Anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap evaluasi publik. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t statistik $< t$ tabel ($1,30 < 1,98$) dan nilai signifikansi $0,19 > 0,05$. (4) Regulasi berpengaruh signifikan terhadap evaluasi publik. Hal ini dilihat dari t statistik $> t$ tabel ($9,92 < 1,98$) dan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. (5) Regulasi tidak memiliki pengaruh terhadap tata kelola. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t statistik $< t$ tabel ($1,22 < 1,98$) dan nilai signifikansi $0,22 > 0,05$. (6) Sosial audit tidak memiliki pengaruh terhadap evaluasi publik. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t statistik $< t$ tabel ($1,45 < 1,98$) dan nilai signifikansi $0,14 > 0,05$. (7) Sosial audit terhadap partisipasi anggaran mengindikasikan pengaruh yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t tabel $> t$ tabel ($128,42 > 1,98$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. (8) Tata Kelola terhadap sosial audit mengindikasikan pengaruh yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t tabel $> t$ tabel ($2,29 > 1,98$) dan nilai signifikansi $0,02 < 0,05$.

Pengaruh Aksesibilitas Anggaran Terhadap Tata Kelola

Hasil pengujian menunjukkan bahwa aksesibilitas anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap tata kelola di kampung perbatasan. Temuan ini sejalan dengan hasil studi dari (Fauzani et al., 2018); (Hambali & Rizqi, 2024). Aksesibilitas anggaran yang baik memungkinkan pemerintah kampung untuk memperoleh dana yang cukup dan tepat waktu, yang pada gilirannya mendukung pelaksanaan berbagai program dan proyek yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat. Ketika anggaran dapat diakses dengan mudah, pemerintah kampung lebih mampu merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif, termasuk dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pengawasan terhadap aktivitas di perbatasan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan keandalan sumber daya finansial adalah faktor kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola di wilayah yang seringkali terpinggirkan ini.

Selain itu, aksesibilitas anggaran yang baik juga berdampak positif terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di kampung perbatasan. Dengan alokasi dana yang jelas dan teratur, pemerintah kampung dapat lebih mudah mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat dan pihak terkait. Proses ini mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi proyek-proyek yang dilaksanakan, sehingga mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Transparansi dalam pengelolaan anggaran ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung, yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Dampak dari aksesibilitas anggaran yang signifikan terhadap tata kelola juga terlihat pada peningkatan kapasitas administratif dan manajerial pemerintah kampung. Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah kampung dapat melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur desa, memperkuat sistem administrasi, serta menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional. Semua ini berkontribusi pada tata kelola yang lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kampung perbatasan. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya memastikan bahwa kampung perbatasan tidak hanya mendapatkan alokasi anggaran yang memadai tetapi juga akses yang lancar terhadap sumber daya tersebut, sebagai langkah penting untuk memperbaiki tata kelola dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Dalam wawancara hasil penelitian dengan Kepala Kampung di salah satu wilayah perbatasan, beliau mengungkapkan bahwa aksesibilitas anggaran sangat berpengaruh terhadap kualitas tata kelola di kampung

tersebut. Beliau menjelaskan bahwa ketika anggaran dapat diakses dengan mudah dan tanpa hambatan, pemerintah kampung mampu merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan dengan lebih efektif dan tepat waktu. Sebaliknya, ketika terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran, banyak program terhambat dan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, yang berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan warga terhadap pemerintah kampung. Kepala Kampung juga menekankan bahwa dengan akses anggaran yang lebih baik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana meningkat, karena masyarakat dapat melihat dan menilai langsung bagaimana anggaran digunakan untuk kemajuan kampung. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa kelancaran akses terhadap anggaran merupakan faktor kunci dalam memperkuat tata kelola di kampung perbatasan.

Pengaruh Aksesibilitas Anggaran Terhadap Evaluasi Publik

Hasil pengujian menunjukkan bahwa aksesibilitas anggaran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap evaluasi publik di kampung perbatasan. Meskipun anggaran yang memadai dan mudah diakses seharusnya memungkinkan pelaksanaan program-program pemerintah dengan lebih transparan dan akuntabel, temuan ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain mungkin lebih dominan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah kampung. Misalnya, meskipun dana tersedia, jika komunikasi antara pemerintah kampung dan masyarakat tidak berjalan dengan baik, atau jika mekanisme evaluasi publik tidak disosialisasikan secara efektif, masyarakat mungkin tetap merasa kurang terlibat atau kurang percaya terhadap proses pengelolaan anggaran. Temuan dari penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian dari (Sinamo et al., 2023); (Indriasih et al., 2022) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa aksesibilitas anggaran saja tidak cukup untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam evaluasi publik. Dalam banyak kasus, masyarakat mungkin tidak memiliki cukup informasi tentang bagaimana anggaran digunakan atau tidak memiliki saluran yang memadai untuk menyuarakan pendapat mereka. Kurangnya pendidikan atau kesadaran tentang hak-hak warga negara dalam mengevaluasi kinerja pemerintah juga bisa menjadi faktor yang membuat anggaran, meskipun mudah diakses, tidak berkontribusi langsung terhadap peningkatan evaluasi publik. Hal ini menekankan perlunya strategi yang lebih holistik yang mencakup peningkatan transparansi, pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan komunikasi antara pemerintah dan warga.

Hasil pengujian ini menggarisbawahi pentingnya memahami bahwa evaluasi publik adalah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Agar aksesibilitas anggaran dapat berdampak positif pada evaluasi publik, perlu ada upaya yang lebih terpadu untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, memperkuat mekanisme pengawasan, dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah tidak hanya terhadap anggaran tetapi juga terhadap informasi yang relevan dan saluran partisipasi yang efektif. Dengan demikian, meskipun aksesibilitas anggaran penting, dampaknya pada evaluasi publik akan lebih signifikan jika didukung oleh upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Dalam wawancara terkait penelitian tentang pengaruh aksesibilitas anggaran terhadap evaluasi publik, seorang warga yang aktif dalam kegiatan komunitas kampung menyatakan bahwa meskipun anggaran kampung lebih mudah diakses dan transparan, hal tersebut tidak secara otomatis meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah kampung. Menurutnya, banyak warga yang masih merasa kurang paham tentang bagaimana cara terlibat dalam proses evaluasi publik, dan beberapa di antaranya tidak melihat manfaat langsung dari partisipasi tersebut. Ia juga menambahkan bahwa meskipun pemerintah kampung telah berupaya untuk membuka akses informasi terkait anggaran, kurangnya sosialisasi dan pendidikan tentang pentingnya evaluasi publik menyebabkan masyarakat cenderung pasif. Warga tersebut menekankan bahwa agar aksesibilitas anggaran bisa berdampak lebih signifikan, perlu ada peningkatan kesadaran dan pendidikan di tingkat komunitas tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran kampung.

Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Evaluasi Publik

Hasil pengujian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap evaluasi publik di kampung perbatasan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat terlibat dalam proses penyusunan dan alokasi anggaran, partisipasi tersebut tidak otomatis berkontribusi pada peningkatan kualitas evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah kampung. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam anggaran mungkin hanya bersifat formalitas atau tidak diiringi dengan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme evaluasi. Sebagai hasilnya, masyarakat tidak memanfaatkan keterlibatan mereka dalam proses anggaran untuk secara kritis mengevaluasi hasil kebijakan dan program pemerintah. Temuan ini bertentangan dengan hasil studi dari (Sujatnika & Sulindawati, 2022); (Sugista, 2017)

yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa ada faktor lain yang lebih dominan yang mempengaruhi evaluasi publik, seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi yang jelas dan transparan, serta mekanisme feedback yang efektif dari pemerintah. Partisipasi dalam anggaran, meskipun penting, mungkin tidak cukup untuk mendorong masyarakat secara aktif menilai kinerja pemerintah jika mereka merasa tidak memiliki cukup informasi atau jika mereka tidak melihat dampak langsung dari keterlibatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memperkuat pendidikan masyarakat tentang anggaran dan proses evaluasi, serta meningkatkan transparansi dan akses informasi agar partisipasi anggaran dapat lebih bermakna.

Hasil pengujian ini juga mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan evaluasi publik. Selain mendorong partisipasi anggaran, pemerintah kampung perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan mekanisme yang mendukung evaluasi yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, partisipasi anggaran dapat diintegrasikan dengan proses evaluasi yang lebih efektif, sehingga masyarakat tidak hanya terlibat dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam pemantauan dan penilaian hasilnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung dan mendorong partisipasi yang lebih kritis dan konstruktif dalam evaluasi publik.

Dalam wawancara, seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengungkapkan bahwa meskipun warga kampung semakin sering dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran, hal ini belum secara signifikan meningkatkan partisipasi mereka dalam mengevaluasi kinerja pemerintah kampung. Menurutnya, banyak warga yang terlibat dalam rapat anggaran hanya sebagai formalitas dan kurang memahami bagaimana anggaran tersebut seharusnya berdampak pada kesejahteraan mereka. Akibatnya, ketika tiba saatnya untuk melakukan evaluasi publik, partisipasi mereka cenderung rendah. Anggota BPD tersebut juga menekankan bahwa kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya evaluasi publik serta keterbatasan akses terhadap informasi anggaran yang lebih rinci menjadi hambatan utama yang membuat warga kurang tergerak untuk terlibat lebih aktif dalam mengevaluasi hasil kebijakan pemerintah kampung.

Pengaruh Regulasi Terhadap Evaluasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi memiliki pengaruh signifikan terhadap evaluasi publik di kampung perbatasan. Temuan ini didukung oleh hasil studi dari (Sipayung et al., 2021); (Paranoan, 2017) yang menyatakan bahwa regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap evaluasi penggunaan dana desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa regulasi yang diterapkan oleh pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional, memainkan peran kunci dalam mendorong masyarakat untuk aktif dalam mengevaluasi kinerja pemerintah kampung. Ketika regulasi yang ada mencakup mekanisme yang jelas untuk partisipasi publik, transparansi anggaran, dan akuntabilitas pemerintah, masyarakat cenderung lebih terlibat dalam proses evaluasi. Regulasi yang baik menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan warga untuk memahami hak-hak mereka dalam mengawasi penggunaan anggaran dan menilai efektivitas program-program pemerintah.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa regulasi yang dirancang dengan baik tidak hanya meningkatkan partisipasi warga, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung. Ketika regulasi memastikan bahwa proses evaluasi publik dilakukan secara transparan dan akuntabel, masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan dihargai. Hal ini mendorong keterlibatan yang lebih aktif dan konstruktif dari masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah kampung. Dengan regulasi yang mendukung, masyarakat tidak hanya berpartisipasi secara formal, tetapi juga secara kritis mengevaluasi dan memberikan masukan yang dapat memperbaiki tata kelola di kampung mereka.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi sebagai instrumen untuk meningkatkan evaluasi publik. Pemerintah perlu terus memperbaiki dan memperbarui regulasi agar sesuai dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Regulasi yang adaptif dan responsif terhadap konteks lokal akan memastikan bahwa evaluasi publik tidak hanya menjadi prosedur formal, tetapi juga menjadi alat yang efektif dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas tata kelola di kampung perbatasan. Dengan demikian, regulasi yang kuat dan efektif menjadi fondasi yang memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik.

Dalam wawancara dengan seorang tokoh masyarakat setempat, beliau menekankan bahwa regulasi yang ada saat ini sangat mempengaruhi partisipasi warga dalam evaluasi kinerja pemerintah kampung. Menurutnya, regulasi yang jelas dan transparan memberikan dorongan bagi warga untuk lebih terlibat dalam menilai dan mengawasi program-program yang dijalankan oleh pemerintah kampung. Ia juga menambahkan bahwa regulasi

yang baik memastikan adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik, sehingga mereka merasa suara mereka didengar dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Tokoh masyarakat ini percaya bahwa semakin kuat regulasi yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat partisipasi publik dalam evaluasi, yang pada akhirnya akan memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kesejahteraan di kampung tersebut.

Pengaruh Regulasi Terhadap Tata Kelola

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tata kelola di kampung perbatasan. Temuan ini tidak sejalan dengan hasil studi dari (Naufal, 2018); (Sarah et al., 2020) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Meskipun regulasi diharapkan menjadi panduan yang jelas untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan transparan, temuan ini mengindikasikan bahwa regulasi yang ada belum cukup kuat untuk mempengaruhi tata kelola secara langsung. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah bahwa regulasi yang diterapkan tidak diikuti dengan implementasi yang efektif di lapangan. Ketiadaan pengawasan yang memadai, kurangnya sumber daya, atau interpretasi regulasi yang berbeda-beda oleh aparat setempat bisa menjadi faktor-faktor yang menyebabkan regulasi tidak mampu meningkatkan kualitas tata kelola.

Selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya bergantung pada adanya regulasi, tetapi juga pada faktor-faktor lain seperti kepemimpinan yang efektif, partisipasi masyarakat, dan ketersediaan sumber daya. Meskipun regulasi memberikan kerangka kerja, jika pemimpin kampung tidak menjalankan peraturan tersebut dengan komitmen yang tinggi atau jika masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam pengawasan, maka dampak regulasi terhadap tata kelola akan sangat terbatas. Hal ini menyoroti pentingnya tidak hanya membuat regulasi yang baik, tetapi juga memastikan bahwa regulasi tersebut didukung oleh struktur dan mekanisme yang memungkinkan implementasi yang efektif.

Hasil penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam memperbaiki tata kelola di kampung perbatasan. Regulasi harus diintegrasikan dengan upaya-upaya untuk memperkuat kapasitas pemerintah kampung, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan adanya pengawasan yang berkelanjutan. Tanpa dukungan dari elemen-elemen tersebut, regulasi, meskipun penting, tidak akan cukup untuk mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi, implementasi yang efektif, dan keterlibatan semua pihak dalam memastikan tata kelola yang lebih baik di kampung-kampung perbatasan.

Dalam wawancara dengan Kepala Kampung setempat, beliau mengungkapkan bahwa meskipun regulasi telah ditetapkan untuk meningkatkan tata kelola, regulasi tersebut belum menunjukkan dampak signifikan dalam praktik sehari-hari. Menurutnya, meskipun ada banyak peraturan yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, implementasinya sering kali terhambat oleh kendala seperti kekurangan sumber daya dan kurangnya pelatihan bagi aparat kampung. Ia juga mencatat bahwa tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan partisipasi aktif dari masyarakat, regulasi tersebut tidak dapat mempengaruhi tata kelola secara signifikan. Kepala Kampung tersebut menekankan pentingnya memperbaiki implementasi regulasi dan meningkatkan dukungan serta kapasitas pemerintah kampung agar peraturan dapat berfungsi dengan baik dan memberikan dampak yang diharapkan terhadap tata kelola.

Pengaruh Sosial Audit Terhadap Evaluasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosial audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap evaluasi publik di kampung perbatasan. Hasil studi ini bertentangan dengan temuan dari (Syaifullah, 2016); (Difinubun et al., 2022) yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Meskipun sosial audit dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi, temuan ini mengindikasikan bahwa proses tersebut belum memberikan dampak yang diharapkan. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah kurangnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam proses sosial audit. Jika masyarakat tidak merasa terlibat secara langsung atau tidak memahami bagaimana sosial audit mempengaruhi kebijakan dan keputusan, maka hasil dari audit tersebut mungkin tidak memengaruhi evaluasi publik secara substansial.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas sosial audit sangat bergantung pada bagaimana proses tersebut diimplementasikan dan dikomunikasikan kepada masyarakat. Jika mekanisme sosial audit tidak diintegrasikan dengan baik dalam sistem tata kelola atau tidak dilengkapi dengan saluran umpan balik yang efektif, masyarakat mungkin tidak melihat manfaat langsung dari proses tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sosial audit dirancang untuk mempromosikan akuntabilitas, tanpa dukungan dari struktur yang memadai dan komunikasi yang efektif, dampaknya terhadap evaluasi publik dapat terbatas.

Temuan ini menekankan perlunya perbaikan dalam pelaksanaan sosial audit serta strategi komunikasi yang lebih baik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk memastikan bahwa sosial audit dapat memengaruhi evaluasi publik, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses tersebut dan memastikan bahwa hasil audit digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan praktik pemerintah. Dengan demikian, sosial audit dapat diintegrasikan secara lebih efektif dalam sistem tata kelola, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap evaluasi publik dan mendorong transparansi serta akuntabilitas yang lebih baik.

Dalam wawancara dengan seorang anggota Komite Pengawasan Desa, beliau menyatakan bahwa sosial audit tampaknya tidak memberikan dampak signifikan terhadap evaluasi publik di kampung perbatasan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sosial audit dilakukan secara rutin, banyak warga yang masih kurang memahami tujuan dan manfaat dari proses tersebut. Akibatnya, meskipun ada laporan dan rekomendasi yang dihasilkan dari audit, masyarakat tidak merasa terlibat atau melihat perubahan nyata dalam kebijakan atau program pemerintah kampung. Anggota Komite tersebut juga mencatat bahwa kurangnya transparansi dalam komunikasi hasil sosial audit dan terbatasnya mekanisme umpan balik dari masyarakat berkontribusi pada minimnya pengaruh sosial audit terhadap evaluasi publik. Ia menekankan perlunya upaya lebih besar dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya sosial audit dan memastikan hasilnya diterjemahkan menjadi tindakan yang jelas dan berdampak.

Pengaruh Sosial Audit Terhadap Partisipasi Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosial audit memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi anggaran di kampung perbatasan. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika proses sosial audit dilakukan dengan efektif, ia dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran kampung. Sosial audit menyediakan platform bagi warga untuk menilai dan memberikan masukan terhadap penggunaan anggaran, sehingga mereka merasa lebih terlibat dan berhak dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap anggaran yang dialokasikan, mendorong mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perencanaan anggaran. Hasil studi ini sejalan dengan temuan dari (Wulandari, 2020); (Masruhin & Kaukab, 2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBDes.

Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa dampak sosial audit terhadap partisipasi anggaran sangat tergantung pada kualitas implementasi dan komunikasi hasil audit. Ketika hasil sosial audit disampaikan secara jelas dan diintegrasikan dengan proses anggaran, masyarakat lebih cenderung merasa bahwa partisipasi mereka dapat mempengaruhi hasil akhir. Proses audit yang transparan dan inklusif memberi kesempatan kepada warga untuk memahami bagaimana dana digunakan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi mereka dalam perencanaan dan pengawasan anggaran. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan pentingnya sosial audit sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam anggaran. Untuk memaksimalkan pengaruh sosial audit, penting bagi pemerintah kampung untuk memastikan bahwa proses audit dilaksanakan dengan integritas, hasilnya dikomunikasikan dengan efektif, dan umpan balik masyarakat diakomodasi dalam perencanaan anggaran. Dengan demikian, sosial audit dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat partisipasi anggaran, mendorong transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas di tingkat lokal.

Dalam wawancara dengan seorang anggota Tim Sosial Audit Kampung, beliau menjelaskan bahwa sosial audit telah secara signifikan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses anggaran. Menurutnya, hasil audit yang dibagikan secara transparan dan melibatkan umpan balik langsung dari warga telah membuat masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki suara dalam penyusunan anggaran. Ia menyebutkan bahwa setelah implementasi sosial audit, terjadi peningkatan partisipasi aktif dalam rapat anggaran dan pengawasan penggunaan dana, karena warga merasa bahwa masukan mereka dihargai dan mempengaruhi keputusan. Anggota tim tersebut menekankan bahwa sosial audit tidak hanya memperbaiki transparansi, tetapi juga mendorong keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat dalam pengelolaan anggaran kampung.

Pengaruh Tata Kelola Terhadap Sosial Audit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola berpengaruh signifikan terhadap sosial audit di kampung perbatasan. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas tata kelola yang baik termasuk transparansi, akuntabilitas, dan integritas mempengaruhi efektivitas proses sosial audit. Ketika pemerintah kampung menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang kuat, proses sosial audit dapat berjalan dengan lebih lancar, karena ada kepastian bahwa data yang diperiksa adalah akurat dan keputusan yang diambil bersifat adil. Tata kelola yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan sosial audit dengan memastikan bahwa audit dilakukan secara sistematis dan hasilnya digunakan untuk perbaikan yang nyata. Hasil studi ini sejalan dengan temuan dari

(Widyatama et al., 2017); (Aprilia, 2019) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dan pengelolaan dana desa.

Selain itu, tata kelola yang efektif memastikan adanya struktur dan mekanisme yang mendukung pelaksanaan sosial audit. Ini termasuk adanya kebijakan yang jelas, prosedur yang terdokumentasi, dan sistem pengawasan yang memadai. Dengan tata kelola yang baik, sosial audit tidak hanya menjadi alat untuk menilai penggunaan anggaran, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Hal ini memungkinkan hasil audit untuk diintegrasikan dengan kebijakan dan tindakan yang relevan, meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam proses audit dan memastikan bahwa temuan audit digunakan untuk memperbaiki kinerja pemerintah kampung.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai hasil sosial audit yang efektif, penting untuk memiliki tata kelola yang mendukung. Tata kelola yang kuat memberikan fondasi yang kokoh bagi sosial audit dengan menyediakan struktur, prosedur, dan komitmen yang diperlukan untuk menjalankan audit secara efektif. Dengan demikian, perbaikan dalam tata kelola tidak hanya memperbaiki proses sosial audit, tetapi juga meningkatkan hasil yang diperoleh dari audit tersebut, mendukung transparansi, dan mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan anggaran di kampung perbatasan.

Dalam wawancara dengan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kampung, beliau menyatakan bahwa tata kelola yang baik memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas sosial audit di kampung perbatasan. Menurutnya, ketika tata kelola diterapkan dengan baik termasuk adanya prosedur yang jelas dan pengawasan yang ketat, sosial audit dapat dilakukan dengan lebih efektif dan hasilnya lebih dapat diandalkan. Ia menjelaskan bahwa struktur tata kelola yang kokoh memungkinkan proses audit dilakukan secara transparan, dan hasilnya digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan praktik. Kepala Dinas tersebut juga mencatat bahwa tata kelola yang baik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil sosial audit, karena mereka merasa bahwa proses audit dilakukan dengan integritas dan data yang diperiksa adalah akurat.

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, dan tata kelola memiliki peran penting dalam mempengaruhi efektivitas pemerintahan di kampung perbatasan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa regulasi yang ada tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap tata kelola, terutama jika tidak diikuti dengan implementasi yang efektif dan dukungan dari sumber daya yang memadai. Sosial audit, meskipun dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tidak selalu mempengaruhi evaluasi publik secara langsung, namun terbukti memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi anggaran. Di sisi lain, tata kelola yang baik terbukti berpengaruh besar terhadap efektivitas sosial audit, menunjukkan bahwa tanpa tata kelola yang kuat, proses audit tidak dapat berjalan secara optimal.

Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara regulasi, mekanisme akuntabilitas sosial, dan tata kelola dalam meningkatkan kualitas pemerintahan di kampung perbatasan. Tata kelola yang baik berfungsi sebagai fondasi yang memungkinkan sosial audit dan peraturan pemerintah untuk berfungsi dengan efektif, sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai perbaikan yang signifikan dalam tata kelola, perlu adanya upaya terintegrasi yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan implementasi sosial audit, dan perbaikan dalam struktur tata kelola. Hasil penelitian ini memberikan dasar yang kuat bagi rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan di kampung perbatasan melalui penguatan ketiga aspek tersebut. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam hubungan antara berbagai aspek tata kelola dan mekanisme akuntabilitas sosial di berbagai konteks lokal, serta mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi efektivitas implementasi peraturan pemerintah di kampung perbatasan.

Referensi

- Ananda, C. F. (2018). *Pembangunan ekonomi daerah: dinamika dan strategi pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.
- Aprilia, I. (2019). Determinan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 109–122.
- Arifin, S. (2022). *Hukum perbatasan darat antar negara*. Sinar Grafika.
- Azhari, D. S., Afif, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian mixed method research untuk disertasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 8010–8025.

- Beni, S. (2021). Kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di perbatasan Jagoi Babang Kalimantan Barat melalui pemberdayaan. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 9(02), 125.
- Difinubun, Y., Asriani, D., & Yanti, I. B. (2022). Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating. *Fair Unimuda*, 2(1), 34–45.
- Diwyanto, K., & Priyanto, D. (2014). Pengembangan pertanian wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Republik Demokrasi Timor Leste. *Pengembangan Inovasi Pertanian*, 7(4), 30888.
- Fauzani, F. M., Purwati, A. S., & Sudjono, S. (2018). Analisis persepsi pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Proceeding of International Conference Sustainable Competitive Advantage*, 8(1).
- Febriana, F., & Ivanaa, J. (2024). Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sebagai Langkah Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus: Desa Lubuk Palas Kabupaten Asahan). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(6), 2512–2519.
- Fernanda, A., M Fauzi Yazid, S., & Silitonga, D. T. S. (2023). Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(5), 77–82.
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tatakelola Rencana Strategis, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Jurnal Accounting Unipa*, 1(1), 20–35.
- Hajar, N. K. D. S., Amrizal, D., Izahsyah, J. R., & Mahardika, A. (2022). *Perencanaan Pembangunan & Pembuatan Kebijakan Daerah: Dari Teori Ke Praktik* (Vol. 1). umsu press.
- Hakeu, F., & Alim, M. S. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian SDGs melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Mohuyula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–9.
- Hambali, D., & Rizqi, R. M. (2024). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(1), 113–123.
- Indriasih, D., Fajri, A., & Febriana, D. (2022). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)*, 3(4), 972–981.
- Limi, M. A., & Yunus, L. (2016). Analisis Potensi Dan Permasalahan Penanggulangan Daerah Tertinggal Di Pesisir Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. *Prosiding Seminar Nasional Agribisnis*, 47–62.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa (studi empiris pada perangkat desa di kecamatan mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), 118–130.
- Naufal, M. R. (2018). Analisis persepsi aparatur pemerintah desa terhadap prinsip good governance dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang (Studi pada aparatur desa di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).
- Noveria, M. (2017). *Kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan: perspektif multidimensi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Paranoan, D. B. (2017). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 3(1), 1–13.
- Prayitno, G., & Subagiyo, A. (2018). *Membangun desa: Merencanakan desa dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan*. Universitas Brawijaya Press.
- Sarah, S., Taufik, T., & Sfitri, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan Spi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 330–342.
- Simanjuntak, T., Panjaitan, D. P., & Efridawati, A. (2023). Pengaruh Kebijakan Anti Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(5), 51–60.
- Sinamo, E. F., Yusra, M., Hilmi, H., & Nazaina, N. (2023). Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Kompetensi Aparatur Desa, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(2), 237–252.
- Sipayung, B. P., Fobia, T., Taena, W., & Joka, U. (2021). Model Pengelolaan Dana Desa Dan Pemberdayaan Petani di Desa Perbatasan Indonesia Dengan Timor Leste. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 19(2), 135–148.
- Sugista, R. A. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa.
- Suherry, S., & Fajar Saputra Belly, M. S. T. (2024). *Manajemen Pembangunan Desa Yang Efektif*. Cv. Azka Pustaka.

- Sujatnika, I. N. J., & Sulindawati, N. L. G. E. (2022). Pengaruh Sistem Pelaporan, Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(02), 378–388.
- Syaifullah, W. A. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengawasan Fungsional Dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Tjilen, A. P. (2019). Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung. Nusamedia.
- Warsilah, H., & Wardiat, D. (2017). Pembangunan Sosial di Wilayah Perbatasan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20.
- Wulandari, I. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Yan Hanry, S. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Desa/Kampung Mansinam (Suatu Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Wilayah Kampung Mansinam Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat).
- Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1–41.